BAB V

KESIMPULAN

Kekuasaan yang dibangun selama Mursi menandakan turunya ekonomi domestik dengan turunya GDP nasional. Masalah ekonomi Mesir yang selama ini dikuasai oleh diktator telah membuat kerusakan sosial. Akan tetapi setelah terpilihnya Mursi sebagai Presiden Mesir, ekonomi, kesejahteraan sosial bagi Masyarakat semakin memburuk dibanding pertumbuhan perekonomian pada masa pemimpin diktator terdahulu. Tanda demokratisasi tersebut membuat kubu oposisi menentang Mursi atas perekonomian yang masih carut marut.

Ekonomi pemerintahan Mursi terus menurun, pertumbuhan ekonomi turun hingga 2,2% pada tahun fiskal 2012, turun dari 5,1% pada tahun 2009-2010. Mata uang Pound Mesir kehilangan 12,5% nilainya terhadap dollar Amerika. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak pada tingkat pengangguran dan kemiskinan. Lebih dari 3,3 juta orang, yaitu 13% menganggur, 46,4% dari populasi yang berusia 20-24 tahun tidak mendapatkan pekerjaan. Rakyat Mesir hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 43% yaitu yang berpendapatan di bawah dua dollar per hari. Hal yang memperparah yakni keadaan defisit anggaran pemerintah Mesir makin membengkak, naik hingga 10,8% dari GDP. Defisit ini membuat Mursi makin kesulitan untuk membantu rakyat Mesir yang miskin.

Perjalan yang panjang bagi konstelasi politik Mesir memberikan kepada kita bahwa membangun suatu negara berdasarkan keadilan dan kebebasan harus memiliki kekuatan bersama. Kekuasaaan yang dibangun selama Mursi sebagai Murabbi menandakan otoriter baru melalui pemaksaan konstitusi Islam dan dekrit Presiden 22 November 2012 dinilai oleh kubu oposisi sipil sebagai kesalahan fatal, karena membuat semua keputusan presiden kebal dari gugatan hukum (Juridical Review) dan menegaskan keabsahan palemen Mesir.

Dengan demikian kubu oposisi sipil diantaranya kubu sekular liberal dan Partai An-Nur memerintahkan Militer dan mobilisasi massa untuk menurunkan Mursi dari jabatanya. Argumen yang menyatakan bahwa Mesir tengah menempuh jalan demokratisasi, kaum oposisi menganggap Mursi tidak lebih dari sekedar dusta belaka, oposisi telah banyak menyatakan Mursi telah melanggar kesepakatan revolusi, pelanggarannya itu Mursi mencoba untuk menghadiahi dirinya sendiri dengan kekuasaan semi kediktatoran melalui dekrit Kepresidenan November tahun 2012.

Kepemimpinan Mursi membuat legislasi melalui konstitusi atau undang-undang dengan gaya kediktatoran melalui suatu senat yang hanya dipilih oleh sepuluh persen saja para pemilih. Oposisi menganggap bahwa Mursi melakukan proses "Ikhwanisasi" dengan cara menjejali jabatan-jabatan publik dengan orang-orang Ikhwanul Muslimin. Aktivis luar negeri oposisi sipil Mesir terus mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi terus-menerus diusik, diperkarakan, dan disanksi hukuman berdasarkan tuntutan-tuntutan yang dibuat.

Selain itu kubu oposisi sangat sedikit di parlemen sehingga mereka ingin menyamai kubu pemerintahan Ikhawanul Muslimin. Sebab kedua adalah ketidak siapan kubu oposisi dari sekular liberal dan Salafy Partai An-nur atas hasil pemungutan suara Pilpres putaran pertama dan kedua. Sehingga dengan hasil yang jauh yakni Partai Kebebasan dan Keadilan 47,18% suara, dengan perolehan tersebut partai Ikhwanul Muslimin menguasai 235 kursi di Parlemen, tempat kedua diduduki oleh kubu konservatif Partai An-Nur Salafy meraih 25% perolehan tersebut Salafy menguasai 121 kursi di Parlemen kemudian urutan terakhir diwakili oleh Kubu Partai Liberal Sekular bentukan dari Partai Demokratik Nasional Partai Wafd, meraih 36 kursi di Majelis Rakyat sisanya yakni Partai Kecil berkoalisi memiliki 33 kursi.

Sebab kedua tersebut sebagai pola untuk alasan dari kubu oposisi sipil berat mengakui kemenangan partai Kebebasan dan Keadilan dari kubu Ikhwanul Muslimin. Hasil tersebut mempengaruhi prilaku oposisi terus menerus menentang Mursi dari jabatan presiden yang berusia kurang lebih satu tahun. Kekecewaan kubu oposisi tidak lain dan tidak bukan merupakan perasaan di mana mereka telah menguasai Mesir berpuluh tahun dalam sistem kedikatatoran kasarnya mereka (oposisi) belum siap dalam menghadapi sistem demokrasi.

Terakhir adalah masalah sebuah kepentingan setiap partai politik di Mesir.

Dalam politik tidak ada kawan abadi dan musuh abadi, akan tetapi kepentingan suatu partai politik yang abadi. Sehingga pecahnya koalisi Ikhwanul Muslimin selama dibentuk satu tahun di bawah kepemimpinan Mursi telah kacau karena

perbedaan kepentingan di parlemen, sehingga kudeta telah menjadi jalan terakhir bagi kepemimpinan Mursi dan Ikhwanul Muslimin.

Bukti tersebut menandakan asumsi kubu oposisi sipil telah gagal dalam menjalankan revolusi tahun 2011, sehingga mereka terus menentang Mursi melalui mobilisasi massa dan lobi kepada Militer Mesir. Usia kepemimpinan Mursi kurang lebih satu tahun mereka tidak meyakini adanya revitalisasi yang dibangun Mesir selama satu tahun tersebut bisa membawa Mesir menjadi lebih baik sehingga solusi akhir oleh Militer dan oposisi adalah Kudeta Mursi.

Foto 1. Demonstrasi Pendukung Mursi "Ikhwanul Muslimin"



Pendukung Mursi Shalat Tahajjud berjamaah



Foto 2. Demikian padatnya pendemo sehingga tempat tidak mencukupi, pendukung Mursi shalat di atas pohon





Foto 4. Perjuangan ini karena kebenaran, dan Tuhan memerintahkan ummat-Nya untuk membela kebenaran

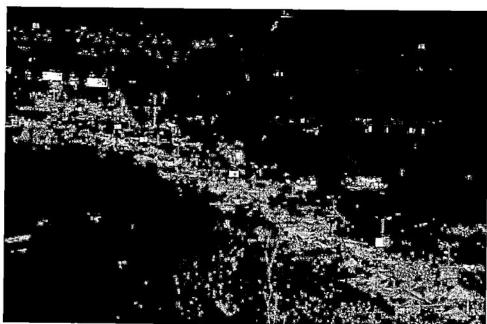


Foto 5. Bisa dikatakan, jamaah tarawih pendukung Mursi ini diikuti umat Islam terbanyak setelah tarawih di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

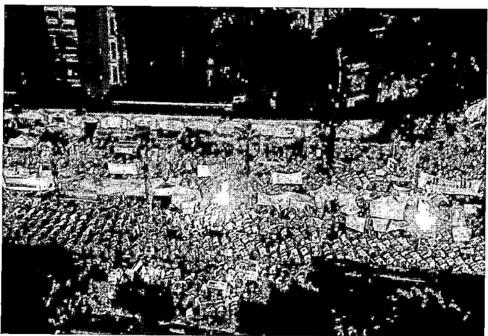


Foto 6. Sujud menghamba, meminta pertolongan pada Tuhan yang Membela Kebenaran



Foto 7. Siapa sebetulnya yang tidak siap berdemokrasi?



Mursi sewaktu menjadi relawan tsunami di Aceh Foto 8 : Islamedia, bersamadakwah